

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Azwar, S. 2005. *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Budiono, H. 2010. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Citra Aditya. Bandung.
- Harahap, M. Yahya. 1989. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Alumni. Bandung.
- Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Fajar Interpratama Mandiri. Jakarta.
- Ibrahim, J. 2004. *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif Dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*. Mandar Maju. Bandung.
- Kasmir. 2005. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Makarim, E. 2003. *Kompilasi Hukum Telematika*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Marbun, S.F., dan Moh Mahfud. 2011. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Liberty. Yogyakarta.
- Mustari, M., dan M. Taufiq Rahman. 2012. *Pengantar Metode Penelitian*. LaksBang Pressindo. Yogyakarta.
- R, Subekti. 1995. *Aneka Perjanjian*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Sidabalok, J. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Soekanto, S. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.
- Soeroso, R. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Sumardjono, Maria S.W. 1997. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian: Sebuah Panduan Dasar*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Sunggono, B. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Sutedi, A. 2014. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Raih Asa Sukses. Jakarta.
- Suyatno, T. 2003. *Dasar-Dasar Perkreditan*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Tangkilisan, H. N. 2003. *Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance*. Balairung & Co. Yogyakarta.
- Usman, R. 2001. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

- Waluyo, B. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktik*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Zamani. 1998. *Manajemen*. IPWI. Jakarta.
- Zed, M. 2008. *Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Prenadamedia Group. Jakarta.

JURNAL

- Baum, David. 1999. Business Links. *Oracle Magazine*. Vol. XIII, No. 3, 36.
- Fitriadi, M., & Sinung D.S. 2014. Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perusahaan Modal Ventura Asing dalam Melakukan Pembiayaan Secara Langsung di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum Gadjah Mada*. 1(2), 77-86.
- Fitriyani, Elvira et.al. 2020. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Maraknya Pelayanan Financial Technology (Fintech) di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 9(3), 559-574. doi: <https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i03.p08>
- Putri, C. R. 2018. Tanggung Gugat Penyelenggara Peer To Peer Lending Jika Penerima Pinjaman Melakukan Wanprestasi. *Jurist-Diction*, 1(2), 460-475. doi: <https://doi.org/10.20473/jd.v1i2.11002>
- Santi, Ernama, Budiharto, & Hendro. 2017. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016). *Diponegoro Law Journal*, 6(3), 1-20.
- Sitompul, M. G. 2018. Urgensi Legalitas Financial Technology (Fintech): Peer To Peer (P2P) Lending di Indonesia. *Jurnal Yuridis Unaja*, 1(2), 68-79, doi: <https://dx.doi.org/10.5281/jyu.v1i2.428>
- Novendra, B., & Aulianisa, S. 2020. Konsep dan Perbandingan Buy Now, Pay Later dengan Kredit Perbankan di Indonesia: Sebuah Keniscayaan di Era Digital dan Teknologi. *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(2), 183-201. doi: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2.444>
- Palilati, R. M. 2016. Perlindungan Hukum Konsumen Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 5(3), 50-67, doi: <http://dx.doi.org/10.29303/ius.v5i1.414>
- Saputra, A. S. 2018. Perlindungan Terhadap Pemberi Pinjaman Selaku Konsumen Dan Tanggung Jawab Penyelenggara Peer To Peer

Lending Dalam Kegiatan Peer To Peer Lending Di Indonesia.
Jurnal Veritas et Justitia Universitas Katolik Parahyangan,
5(1), 238-261, doi: <http://dx.doi.org/10.25123/vej.3057>

Sitompul, M.G. 2018. Urgensi Legalitas Financial Technology (FinTech):
Peer To Peer (P2P) Lending di Indonesia. *Jurnal Yuridis Unaja*,
1(2), 68-79, doi: <https://dx.doi.org/10.5281/jyu.v1i2.428>

Sitompul, Z. 2012. Konsepsi Transformasi Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal
Legislasi Indonesia*, 9(3), 343-360.

HASIL PENELITIAN

Alfhica Rezita Sari. 2018. *Perlindungan Hukum Pemberi Pinjaman Dalam
Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer to Peer
Lending di Indonesia*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas
Islam Indonesia. Yogyakarta.

Yuda Fuadi. 2019. *Kajian Hukum Terhadap Penggunaan Paylater Dalam
Pembayaran Transaksi Antara Konsumen Dengan Traveloka
Ditinjau Dari POJK Nomor 77/POJK.01/2016*. Skripsi.
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan.

Laurentia Ayu Kartika. 2021. *Tanggungjawab Penyelenggara Layanan
Peer To Peer Lending Terhadap Resiko Keuangan Pengguna
Layanan Peer To Peer Lending Berdasarkan POJK NO.
77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang
Berbasis Teknologi Informasi*. Tesis. Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara. Medan.

Kristo Evan Tejakusuma. 2021. *Legal Protection For Gojek Consumer In
P2P Lending Feature Paylater According To POJK
77/POJK.01 2016*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas
Gadjah Mada. Yogyakarta.

INTERNET

Abraham Wasli, “Sejarah Awal Berdirinya Marketplace Tokopedia,
Shopee, Bukalapak, Lazada, Blibli dan JDID”,
[https://teknologi.id/os/sejarah-awalberdirinya-marketplace-
tokopedia-shopee-bukalapak-lazada-blibli-danjdidd](https://teknologi.id/os/sejarah-awalberdirinya-marketplace-tokopedia-shopee-bukalapak-lazada-blibli-danjdidd), diakses
pada Oktober 2021.

AFPI, “Tentang Kami”, <https://www.afpi.or.id/about>, diakses pada Juli
2022.

Bari Baihaqi, “Survei SnapCart, Ini Deretan E-Commerce Yang Paling
Banyak Diingat Masyarakat”,

<https://www.neraca.co.id/article/153712/survei-snapcart-ini-deretan-e-commerce-yang-paling-banyak-diingat-masyarakat>, diakses pada Desember 2021.

Bina Nusantara University Popular Articles, "Apa itu PayLater?," <https://sis.binus.ac.id/2020/01/30/apa-itu-paylater/>, diakses pada Januari 2022.

Duwitmu.com, "Review Shopee Paylater Cicilan Tanpa Kartu Kredit", <https://duwitmu.com/pinjaman-online/shopee-paylater-cicilan-tanpa-kartukredit-adalah/>, diakses pada November 2021.

HuffPost, "What is FinTech?", https://www.huffpost.com/entry/what-is-fintech_b_58a20d80e4b0cd37efcfbaa, diakses pada Mei 2022.

Ibnu Ismail, "Fintech: Pengertian, Jenis, dan Manfaatnya untuk Masyarakat", https://accurate.id/ekonomi-keuangan/fintech-adalah/#Sejarah_Fintech, diakses pada Mei 2022

IOSCO, "IOSCO Research Report On Financial Technologies (Fintech)", <https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD554.pdf>, diakses pada Februari 2022.

Mandiri, "Mandiri Virtual Account", <http://www.bankmandiri.co.id/article/commercial-virtual-account.asp>, diakses pada Mei 2022

Novita Ayuningtyas, "Viral Wanita Curhat Dapat Tagihan Paylater Capai Rp 17 Juta, Ini Fakta Sebenarnya", <https://hot.liputan6.com/read/4603715/viral-wanita-curhat-dapat-tagihan-paylater-capai-rp-17-juta-ini-fakta-sebenarnya>, diakses pada Januari 2022.

Noviyanto, "Definisi Fintech, Manfaat Fintech, dan Seluk Beluk Fintech", <https://koinworks.com/blog/definisi-fintech/>, diakses pada Mei 2022.

Otoritas Jasa Keuangan, "FAQ LPMUBTI - Kategori Perusahaan Penyelenggara", <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/FAQ-Terkait-Layanan-Pinjam-Meminjam-Uang-Berbasis-Teknologi-Informasi---Kategori-Perusahaan-Penyelenggara/FAQ%20LPMUBTI%20-%20KATEGORI%20PERUSAHAAN%20PENYELENGGA%20RA.pdf>, diakses pada Juni 2022.

Otoritas Jasa Keuangan, "Financial Technology – P2P Lending", <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial->

technology/Default.aspx , diakses pada Juni 2022.

Otoritas Jasa Keuangan, “Siaran Pers: OJK Perkuat Operasional Fintech Peer to Peer Lending”, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Perkuat-Operasional-Fintech-Peer-to-Peer-Lending-.aspx>, diakses pada Juli 2022.

Otoritas Jasa Keuangan, “Yuk Mengenal Fintech! Keuangan Digital Yang Tengah Naik Daun”, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10468>, diakses pada Januari 2022.

Radio Republik Indonesia, “Shopee Pimpin Pasar E-commerce Indonesia Sepanjang 2021”, <https://rri.co.id/ekonomi/1240210/shopee-pimpin-pasar-e-commerce-indonesia-sepanjang-2021>, diakses pada Januari 2022.

Shopee, “Bagaimana cara mengaktifkan SPayLater”, <https://help.shopee.co.id/s/article/Bagaimana-cara-mengaktifkanShopeePayLater>, diakses pada November 2021.

Shopee, “FAQ SPayLater”, <https://help.shopee.co.id/portal/article/72618-SPayLater>, diakses pada Mei 2022

Shopee, “Metode Pembayaran apa saja yang dapat digunakan di Shopee?”, <https://help.shopee.co.id/s/article/Metode-pembayaran-apa-saja-yang-dapat-digunakan-di-Shopee>, diakses pada Oktober 2021.

Universitas Stekom, “Pengertian Teknologi Menurut Ahli”, <http://teknik-informatika-s1.stekom.ac.id/informasi/baca/Pengertian-Teknologi-Menurut-Para-Ahli/a11e499ed0f91399988fc7b98c460cdb2769d0bb>, diakses pada Januari 2022.

Viral Orchard, “10 Cara Mengaktifkan Shopee Paylater 2021: Syarat & Cara Daftar”, <https://www.viralorchard.com/cara-mengaktifkan-shopeepaylater/>, diakses pada November 2021.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253)

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5952)

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400)

Peraturan Bank Indonesia No. 3/11/PBI/2001 tentang Perubahan Atas Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 2/24/PBI/2000 tentang Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia dengan Pihak Ekstern (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 4108)

Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Financial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6142)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK/07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5431)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6238)

Syarat dan Ketentuan Layanan Spaylater dan Layanan SPinjam Bagi Penerima Pinjaman (“Syarat dan Ketentuan Layanan”)

LAIN – LAIN

Laporan Keberlanjutan PT Commerce Finance Tahun 2021

Wawancara dengan Staff Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech (DP3F), Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 7 Juli 2022.